

**SIARAN PERS****Otorita Ibu Kota Nusantara**

Nomor: 113/sipers/sdmhumas-oikn/04/2024

01 April 2024

**Kerjasama Otorita IKN dan Komnas HAM untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

**BALIKPAPAN** - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengadakan pertemuan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan Surat Teguran I yang terkait dengan penataan kawasan di wilayah Sepaku, serta membahas langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh kedua belah pihak untuk menanggapi permasalahan tersebut. Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Otorita IKN, Balikpapan pada hari Senin, (01/04/2024).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan tingkat tinggi dari kedua lembaga, termasuk Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) serta Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati. Dalam pertemuan tersebut, Otorita IKN secara tegas menyatakan komitmennya untuk menata kawasan Sepaku dengan menekankan pentingnya keteraturan tata ruang dan perizinan, sehingga dapat menghindari permukiman yang tidak teratur. Komnas HAM juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan pembangunan, dan memberikan masukan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.

Otorita IKN dan Komnas HAM sepakat untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dalam berbagai aspek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kerja sama ini mencakup penguatan kapasitas pegawai Otorita IKN dalam hal hak asasi manusia, kolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat, serta kerjasama dalam pemantauan dan penegakan hak asasi manusia di IKN.

Kedua belah pihak juga menyetujui untuk saling berbagi data dan informasi yang relevan guna mendukung langkah-langkah pembangunan yang berkelanjutan dan berlandaskan HAM. Komnas HAM menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul.

Kerjasama yang erat antara Otorita IKN dan Komnas HAM diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

**Biro SDM dan Humas Otorita Ibu Kota Nusantara****Kontak:**halo@ikn.go.id / [humas@ikn.go.id](mailto:humas@ikn.go.id)

Website : [ikn.go.id](http://ikn.go.id)  
Instagram : [instagram.com/ikn\\_id](https://www.instagram.com/ikn_id)  
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)  
Twitter : [twitter.com/ikn\\_id](https://twitter.com/ikn_id)  
Youtube : IKN Indonesia

#KotaDuniauntukSemua  
#Nusantara  
#IbuKotaNegara



NUSANTARA

# SIARAN PERS

---

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Otorita IKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

---

**DOKUMENTASI FOTO**  
**Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara**



